

Pernyataan Sikap

Memperingati September Hitam—Melawan Lupa, Menuntut Keadilan

Kami yang tergabung dalam Gerakan Kolektif Mahasiswa USU, diinisiasi oleh kawan-kawan Mahasiswa Sejarah melalui rangkaian aksi ini menyatakan sikap kami terhadap kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, represifitas aparat, dan perlunya solusi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Dengan kesadaran akan sejarah kelam bangsa ini terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dan maraknya represifitas aparat dalam menghadapi masyarakat, kami dengan tanggungjawab moral dan kesadaran penuh menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama kami menegaskan bahwa sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh begitu banyak peristiwa kelam khususnya di Bulan September yakni, Tragedi 1965 yang melahirkan genosida politik, tragedi Tanjung Priok 1984, Peristiwa Semanggi 1999, pembunuhan aktivis Munir Said Thalib 2004, kekerasan selama aksi #Reformasidikorupsi, dan kekerasan selama aksi di Agustus Kelam yang terhitung 27-31 Agustus 2025. Peristiwa ini menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya dan menjadi wajah gelap negara yang harus diselesaikan. Mereka yang menjadi korban sampai hari ini belum mendapat keadilan dan negara sekali lagi tidak pernah serius menuntaskan permasalahannya.

Kedua kami mengecam keras kultur kekerasan aparat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Praktik kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, pembungkaman terhadap suara kritis, hingga kriminalisasi terhadap gerakan masyarakat sipil masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini memperlihatkan bahwa negara abai dan tidak menjamin martabat manusia. Pemerintah dalam hal ini secara nyata telah mengkhianati berbagai institusi dan instrument hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Ketiga kami melihat bahwa upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia selalu menemui jalan buntu karena dilakukan setengah hati. Negara kerap berdalih dibalik stabilitas politik, keamanan dan ekonomi tanpa melihat realitas ditengah masyarakat. Tidak adanya kemauan politik untuk menyelesaikan kasus ini menjadi penghambat utama dalam upaya penegakan hukum. Selain itu saat ini pelaku-pelaku pelanggaran HAM justru duduk dalam lingkaran kekuasaan. Tanpa penegakan hukum, luka sejarah ini akan terus terbuka dan akan terjebak dalam siklus impunitas.

Keempat kami menyerukan agar negara segera:

1. Membuka kembali setiap kasus pelanggaran HAM dan menjamin keterbukaan informasi dengan membuka dokumen terkait tanpa kecuali.
2. Menghentikan praktik dan budaya kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, petani, jurnalis, dan kelompok adat.
3. Memulihkan hak-hak korban dan keluarga korban, baik secara material maupun immaterial
4. Mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat baik melalui mekanisme hukum nasional maupun internasional
5. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, dan penghormatan martabat manusia dalam setiap kebijakan negara

Kelima kami menegaskan bahwa melawan lupa adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan. Aksi berkabung ini bukan sekedar seremonial, namun menjadi cara agar setiap korban yang gugur tetap hadir sebagai pengingat agar negara segera bertanggungjawab dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut. tanpa kebenaran, tanpa keadilan, dan upaya pemulihan bagi korban, masa depan demokrasi Indonesia dipastikan tidak dalam kondisi baik.

Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami akan berdiri bersama korban, keluarga korban, serta elemen masyarakat yang terus berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Kami tidak akan berhenti bersuara hingga negara menunaikan kewajiban konstitusionalnya. Hukum harus ditegakkan demi demokrasi Indonesia.

Hormat kami

Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan Mahasiswa Ilmu Sejarah USU

Dalam Aksi Damai September Hitam 2025